

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral.

Etika merupakan kesediaan jiwa akan kesusilaan atau kumpulan dari peraturan kesusilaan. Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakan bermoral. Sesuai dengan moralitas dan perilaku masyarakat setempat.

Etika dapat dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pertama, masalah yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin lama semakin kompleks, Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah melakukan *adjustment* (penyesuaian) yang menuntut *discretionary power* (kekuatan pertimbangan/kebijaksanaan) yang besar.

Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparturnya. Etika dalam pemerintahan harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat yang harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparatur dalam hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum nilai-nilai suatu etika pemerintahan yang perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional antara lain: bahwa Aparat wajib mengabdikan kepada kepentingan umum, Aparat adalah motor penggerak “*head*” dan “*heart*” bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Aparat harus berdiri di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak (mediator), Aparat harus jujur, bersih dan berwibawa, Aparat harus bersifat diskresif, bisa membedakan mana yang rahasia dan tidak rahasia, mana yang penting dan tidak penting, dan aparat harus selalu bijaksana dan sebagai pengayom.

Perlu dipahami bahwa dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terdorong untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari.

Berbicara mengenai etika pemerintahan tidak terlepas dari etika birokrasi, birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (*public goods and services*) baik secara langsung maupun tidaklangsung bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang

disebut dengan istilah birokrasi.

Dalam kaitan dengan Etika pemerintahan maka hal yang terkait proses penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan public. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa konteks dalam beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis merasa tertarik mengambil pokok bahasan Skripsi dengan menitikberatkan pada : "Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, muncul permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :  
Bagaimana Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan

kinerja aparatur pemerintah (Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis agar dapat digunakan sebagai literatur atau referensi bagi penelitian berikutnya yang terkait tentang implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan).
2. Manfaat Praktis Bagi pemerintah, agar menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pemerintahan yang akan datang.
3. Bagi masyarakat, agar dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam melaksanakan tugas yang diberikan, baik bagi pekerja maupun mahasiswa.
4. Bagi penulis, agar menjadi bahan pembelajaran untuk melatih dan mengasah daya pikir dalam melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja.